



Kesenjangan Peran Pemerintah dalam Perekonomian dan Rasio PNS-Penduduk Antar Provinsi di Indonesia

Yuliana Ria Uli Sitanggang, S.Si, M.Si

Widyaiswara Madya Pusdiklat BPS
Jalan Jagakarsa No.70 Lenteng Agung, Jakarta Selatan

(Diterima 18 November 2015; Diterbitkan 04 Desember 2015)

Abstract: *This study serves to answer three important questions regarding the role of government at provincial level in Indonesia. These questions are related to the role of government, namely the gap of the economic role of government among provinces, the size of government and the relationship between those two variables. Finding from the study suggests that the economic role of government at provincial levels tend to increase with the gap among provinces also tend to widen. The study also found that ratio of government officers to population tends to fluctuate with the gap tends to increase. Other finding is that there is a positive relationship between the economic role of government and the ratio of government officer to population in which the strength of the relationship tend to be weaken.*

Keywords: *economic development economic role of government, ratio of government officer to population, gap*

Corresponding author: Yuliana Ria Uli Sitanggang, E-mail: jr.ulisitanggang@gmail.com; Tel/Fax.: 021-7873783 /021 7875497, 021 7873955.

Pendahuluan

Pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan suatu negara. Adelman (2000) menengarai tiga fase penting pemerintah dalam pembangunan. Fase pertama adalah sebagai penggerak. Dalam fase ini pemerintah mengambil peran sebagai penggerak dan pendorong seluruh kegiatan pembangunan. Fase ini terjadi ketika belum banyak, bahkan belum ada, pihak swasta yang terlibat. Fase berikutnya adalah peran pemerintah sebagai penyelesaian masalah yang timbul. Peran pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan ketika terjadi persoalan dengan keterlibatan swasta dalam pembangunan. Pada fase ini seringkali peran pemerintah memiliki dua sisi yang dipertentangkan. Tentang harga suatu barang atau jasa, misalnya, dunia usaha berharap dapat menentukan harga sesuai dengan mekanisme pasar. Di saat yang sama, ketika terjadi hambatan dalam usaha, seperti ketiadaan infrastruktur dan sebagainya, dunia usaha berharap pemerintah akan dapat menyediakannya. Fase terakhir adalah fase rehabilitasi. Fase ini muncul sebagai jawaban dari persoalan yang muncul di fase kedua yang seringkali beranggapan bahwa intervensi pemerintah dalam pembangunan seringkali justru hanya sebagai pengganggu terhadap optimalisasi usaha pembangunan. Pada fase ini pemerintah melakukan reevaluasi terhadap perannya yang optimal dalam proses pembangunan ekonomi.

Adelman juga mencatat bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dari suatu negara. Revolusi industri yang terjadi dalam abad 19 antara lain karena adanya peran pemerintah dalam mengembangkan kondisi ekonomi dan kelembagaan saat itu. Selain itu pemerintah juga memiliki peran aktif dalam membantu dunia usaha dengan mengurangi berbagai hambatan yang ada, mulai dari regulasi sampai dengan penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk pengembangan industri. Peran lain adalah dengan melakukan promosi untuk memperluas kapasitas produksi dunia usaha.

Implementasi peran pemerintah dalam pembangunan pada dasarnya dilakukan melalui orang-orang yang bekerja untuk dan atas nama pemerintah. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, peran ini antara lain dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena Indonesia terbagi ke dalam 35 provinsi dengan berbagai kondisinya masing-masing, maka salah satu persoalan yang muncul adalah terjadinya kesenjangan pembangunan. Idealnya, kesenjangan pembangunan dapat dikurangi dengan alokasi PNS, yang diharapkan dapat berperan sebagai penggerak pembangunan, yang memadai di masing-masing provinsi atau wilayah administrasi yang lebih kecil.

Tulisan singkat ini akan mencoba mengamati peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi di masing-masing provinsi.

Metodologi

Terdapat tiga pertanyaan yang akan coba dijawab melalui penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah tren kesenjangan peran pemerintah dalam perekonomian antar provinsi?
- b. Bagaimanakah tren kesenjangan rasio PNS-Penduduk antar provinsi?
- c. Apakah terdapat hubungan antara rasio PNS-penduduk dengan peran pemerintah dalam perekonomian antar provinsi?

Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut akan digunakan ukuran statistik koefisien variasi dan koefisien korelasi. Metode penghitungan masing-masing koefisien secara ringkas adalah sebagai berikut:

a. Koefisien Variasi

Koefisien variasi merupakan ukuran statistik yang dihitung dengan formula:

$$KV_x = \frac{SD_x}{\bar{x}}$$

Dengan SD_x merupakan standar deviasi dari variabel x dan \bar{x} adalah nilai rata-rata dari variabel x . Nilai KV yang semakin kecil menunjukkan variasi (kesenjangan) x yang semakin kecil, sebaliknya jika nilainya semakin besar maka variasinya (kesenjangan) semakin besar pula.

b. Koefisien Korelasi

Formula untuk menghitung koefisien korelasi antara variabel x dan y adalah:

$$r_{xy} = \frac{Cov_{xy}}{S_x S_y}$$

dengan S adalah standar deviasi dan Cov merupakan kovarians. Nilai koefisien korelasi adalah $-1 \leq r \leq 1$. Nilai r yang mendekati 1 menunjukkan hubungan yang kuat, sebaliknya jika mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah. Sementara tanda (positif) atau negatif menunjukkan arah hubungan dari kedua variabel.

Variabel-variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peran pemerintah dalam perekonomian

Untuk mengukur peran pemerintah dalam perekonomian dalam penelitian digunakan proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap produk domestik regional bruto. Baik konsumsi pemerintah maupun PDRB yang digunakan adalah yang dihitung atas dasar harga berlaku. Sumber data yang digunakan adalah “Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia 2009-2013” yang dipublikasikan oleh BPS pada tahun 2014.

b. Rasio PNS-Penduduk

Rasio PNS-penduduk adalah rasio antara PNS terhadap jumlah penduduk di masing-masing provinsi. Data penduduk diestimasi berdasarkan data banyaknya rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga menurut provinsi yang dihasilkan oleh BPS. Data PNS juga diperoleh dari website BPS.

Hasil dan Pembahasan

a. Tren kesenjangan peran pemerintah dalam perekonomian antar provinsi

Hasil pengolahan berdasarkan data yang diperoleh dari BPS secara ringkas adalah seperti pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rasio Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB

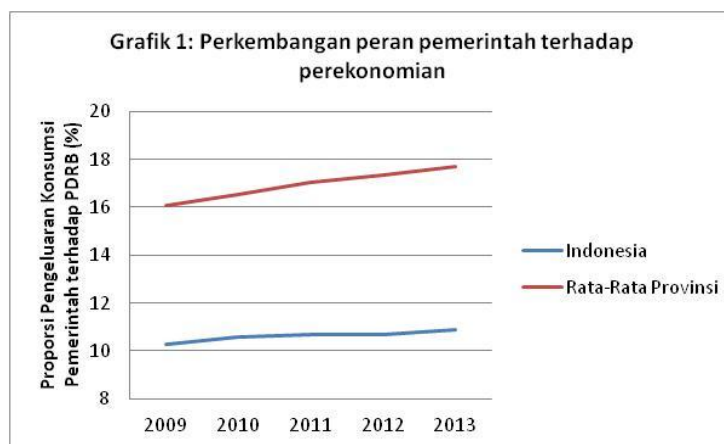
Tahun	Indonesia (%)	Antar Provinsi*		
		Rata-rata (%)	Standar Deviasi	Koefisien Variasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2009	10,30	16,08	7,38	0,4588
2010	10,57	16,54	7,72	0,4670
2011	10,67	17,04	8,20	0,4811
2012	10,69	17,36	8,53	0,4916
2013	10,88	17,70	8,88	0,5016

Keterangan: Hasil pengolahan data PDRB provinsi menurut penggunaan yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik.

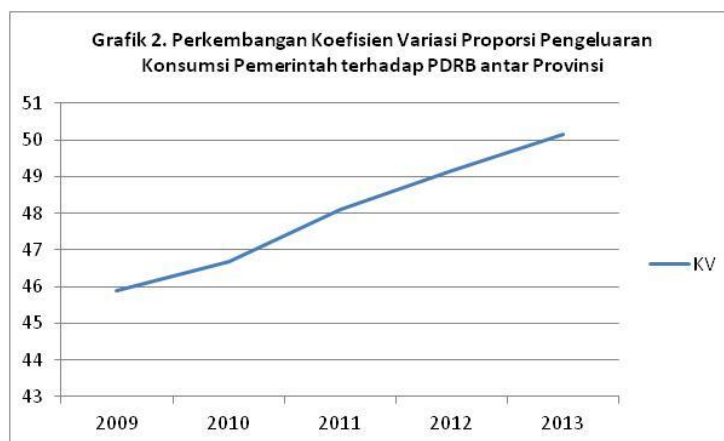
*Penghitungan rata-rata, standar deviasi dan koefisien variasi hanya dilakukan berdasarkan data 33 provinsi (tidak termasuk Kalimantan Utara yang tidak tersedia datanya).

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi pemerintah terhadap perekonomian Indonesia secara umum menunjukkan peningkatan dalam periode 2009-2013,, walaupun peningkatan yang terjadi cenderung sangat lambat. Pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2009 adalah sekitar 10,30 persen dari total produk domestik bruto Indonesia. Proporsi ini hanya meningkat sedikit menjadi 10,88 persen pada tahun 2013.

Gambaran yang sama juga ditunjukkan oleh rata-rata kontribusi pemerintah di level provinsi terhadap perekonomian regional. Rata-rata proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2009 adalah sebesar 16,08 persen dan hanya sedikit meningkat menjadi 17,70 persen pada tahun 2013.



Sementara hasil penghitungan di kolom (5) memperlihatkan bahwa koefisien variasi dari proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB antar provinsi menunjukkan kecenderungan terus meningkat. KV pada tahun 2009 baru sekitar 45,88 persen dan secara perlahan terus merangkak menjadi sekitar 50,16 persen pada tahun 2013. Perkembangan KV ini adalah seperti yang disajikan pada Grafik 2.



Tampak bahwa kemiringan kurva KV di Grafik 2 jauh lebih tajam dibandingkan dengan kemiringan kurva proporsi pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB di Grafik 1. Hal ini memperlihatkan bahwa terjadinya peningkatan peran pemerintah terhadap perekonomian regional provinsi-provinsi di Indonesia ternyata disertai dengan semakin lebarnya kesenjangan peran tersebut antar provinsi.

b. Tren kesenjangan rasio PNS-Penduduk antar provinsi

Rasio PNS terhadap jumlah penduduk sebenarnya merupakan ukuran yang menunjukkan berapa banyak PNS yang tersedia untuk memberikan layanan publik per penduduk di suatu wilayah. Oleh karena rasio ini memiliki nilai relatif kecil, maka penghitungan dilakukan untuk setiap seribu penduduk. Nilai rasio PNS-penduduk dalam konteks efisiensi ekonomi sering digunakan indikator terhadap ukuran pemerintah, karena semakin kecil nilainya semakin kecil pula jumlah PNS yang diperlukan untuk melayani penduduk di suatu wilayah.

Tabel 2. Rasio PNS per Seribu Penduduk

Tahun	Indonesia (PNS per 1000 penduduk)	Antar Provinsi*		
		Rata-rata Provinsi (PNS per 1000 penduduk)	Standar Deviasi	Koefisien Variasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	17.99	24.71	7.95	0.3216
2008	17.83	24.35	7.57	0.3108
2009	19.52	27.60	9.11	0.3302
2010	19.36	27.04	9.01	0.3331
2013	17.61	25.23	9.05	0.3588

Keterangan: hasil pengolahan data yang diperoleh dari website BPS: www.bps.go.id.

*Penghitungan dilakukan berdasarkan data 33 provinsi (selain Kalimantan Utara).

Data penduduk yang digunakan merupakan hasil estimasi dari data banyaknya rumah tangga dan data rata-rata anggota rumah tangga menurut provinsi.

Data di Tabel 1 menunjukkan bahwa rasio PNS-penduduk di Indonesia belfluktuasi dalam kurun 2007-2013, walaupun rentang kisaran fluktuasinya tidak terlalu besar. Hal ini memperlihatkan bahwa perkembangan efisiensi ekonomi dari PNS di Indonesia sebenarnya relatif tidak berubah dalam kurun pengamatan.

Gambaran yang diperoleh dari rata-rata rasio di masing-masing provinsi agaknya juga relatif tidak berbeda: menunjukkan fluktuasi dengan rentang kisaran yang sedikit lebih tinggi.

Jika diperhatikan angka koefisien variasi dari rasio antar provinsi, tampak bahwa kesenjangan rasio antar provinsi menunjukkan kecenderungan meningkat. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tingkat kesenjangan yang terjadi pada peran pemerintah terhadap perekonomian regional, kesenjangan rasio PNS-penduduk di tingkat provinsi relatif jauh lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh PNS antar provinsi relatif lebih merata dibandingkan dengan perbedaan peran pemerintah secara ekonomi.

c. Hubungan antara rasio PNS-penduduk dengan peran pemerintah dalam perekonomian regional

Koefisien korelasi antara peran pemerintah dalam perekonomian regional provinsi dengan rasio PNS-penduduk di tingkat provinsi adalah sebagai berikut

Tabel 3. Koefisien Korelasi antara Peran Pemerintah dengan rasio PNS-Penduduk

Tahun	Koefisien korelasi
2009	0.706664
2010	0.67437
2013	0.575948

Keterangan: hasil pengolahan berdasarkan hasil pengolahan data untuk Tabel 1 dan 2.

Koefisien korelasi yang diperoleh menunjukkan bahwa antara peran pemerintah secara ekonomi di tingkat provinsi memiliki hubungan positif dengan rasio PNS-Penduduk. Artinya peningkatan peran ekonomi dari pemerintah sejalan dengan peningkatan dari rasio PNS-Penduduk. Namun demikian jika diperhatikan perkembangan nilainya, koefisien korelasi antar kedua variabel yang diamati ternyata menunjukkan kecenderungan semakin melemah.

Temuan ini sebenarnya tidak dengan mudah dapat diinterpretasikan, mengingat variabel yang digunakan di dalam penelitian relatif terbatas. Salah satu interpretasi yang dapat dikemukakan adalah adanya kecenderungan peningkatan efisiensi PNS dalam memberikan layanan dan jasa pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi regional. Interpretasi ini berdasarkan fakta bahwa peran pemerintah dalam perekonomian regional provinsi terus meningkat, walaupun rasio PNS-Penduduk menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun.

Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan dari penelitian yang telah dikemukakan, maka dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. Peran pemerintah terhadap perekonomian regional provinsi menunjukkan kecenderungan terus meningkat yang disertai dengan semakin lebarnya kesenjangan peran tersebut antar provinsi.
- b. Rasio PNS-Penduduk menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan kesenjangan yang juga cenderung melebar, namun tingkat kesenjangan masih jauh dibawah kesenjangan peran ekonomi pemerintah.
- c. Terdapat hubungan positif antara peran pemerintah dalam perekonomian regional dengan rasio PNS-Penduduk antar provinsi, namun demikian keeratn hubungan tersebut cenderung terus melemah.

Mengingat keterbatasan data yang dapat diakses, terutama data tentang PNS dengan berbagai aspeknya, misalnya tingkat pendidikan, lama bekerja dan sebagainya pada level provinsi, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jumlah variabel yang relatif terbatas. Untuk lebih memperjelas peran pemerintah (yang dalam konteks pelaksanaan pembangunan dapat diwakili oleh PNS), maka dalam penelitian selanjutnya perlu dilakukan elaborasi terhadap berbagai variabel terkait lainnya.

Daftar Pustaka

- Clements, B., Gupta, S., Karpowicz, I., Tareq, S. (2010). Evaluating Government Employment and Compensation. International Monetary Fund.
- Adelman, Irma. (2000) The role of government in economic development. Dalam Foreign Aid and Development. Lessons learnt and directions for the future (2000): 48-79.